

**Analisis Peran Amerika Serikat Dalam Menanggapi Kasus Pelanggaran
HAM Di Tibet Pada Pemerintahan Presiden Barrack Obama Ditinjau Dari
Perspektif *National Interest***

SKRIPSI



Oleh:

M Aditya Dwi Sukmara

16323097

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**Analisis Peran Amerika Serikat Dalam Menanggapi Kasus Pelanggaran
HAM Di Tibet Pada Pemerintahan Presiden Barrack Obama Ditinjau Dari
Perspektif *National Interest***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

M Aditya Dwi Sukmara

16323097

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Analisis Peran Amerika Serikat Dalam Menanggapi Kasus Pelanggaran HAM di Tibet Pada Pemerintahan Presiden Barrack Obama Ditinjau Dari Perspektif *National Interest*

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

4 Desember 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

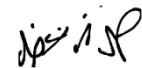
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 2 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 3 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
- 4 Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.







HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Aditya Dwi Sukmara

No. Mahasiswa : 16323097

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Peran Amerika Serikat Dalam Menanggapi Kasus Pelanggaran HAM di Tibet Pada Pemerintahan Presiden Barrack Obama Ditinjau Dari Perspektif *National Interest*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,



M Aditya Dwi Sukmara

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Mama

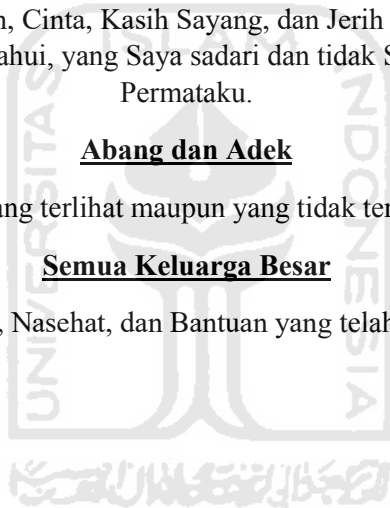
Atas segala Do'a, Dukungan, Cinta, Kasih Sayang, dan Jerih Payah Mereka. Yang Saya ketahui dan tidak Saya ketahui, yang Saya sadari dan tidak Saya sadari. Terimakasih, Permataku.

Abang dan Adek

Atas segala dukungan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. *Thanks a lot bro.*

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas Do'a, Nasehat, dan Bantuan yang telah diberikan selama ini.



HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

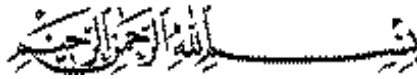
“It Always Impossible Until It’s Done”

Nelson Mandela

“Hadapi apapun prosesnya, jangan lari”

M Aditya Dwi Sukmara

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Fu'ad Nashori S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hanga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Atas segala bimbingan, waktu, dan pemikiran yang diberikan sejak sebelum skripsi ini dibuat, baik itu siang maupun malam, dan ketika sibuk dan juga senggang. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak sebagai amal jariyah, *aamiin yaa Rabbal 'aalamiin*.
4. Ibu Karina Utami Dewi S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan, motivasi, serta konsultasi yang sangat berperan besar terhadap masa perkuliahan saya.

5. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional UII yang banyak memberikan ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang tak dapat terhitung jumlahnya. Semoga kebaikan Bapak/Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik pula.
6. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Mba Mardiatul Khasanah yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama pengerjaan skripsi, dan ketika masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Bang Dedy, Mba Dila, adek Fajar dan adek Rayyan yang mendukung dari jauh untuk Adit supaya komitmen dalam menyelesaikan studinya hingga sampai di titik ini.
10. Hafiz Jo dan Yayat yang telah menemani hari-hari di masa perkuliahan sebagai sahabat yang mendorong dan mendukung penulis dalam bermalas-malasan dalam segala hal.
11. Dimas dan Bim yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dengan penulis pada saat proses penulisan skripsi.
12. Liu Kupluk, Sarjun dan Sirwan yang telah menjadi *partner* penulis dalam menyalurkan hobinya mendaki gunung di Jawa Tengah.
13. Keluargaku di Jogja: Joateng, Amin, Rio, Ahmad, Bibi, Bagas, Taufik, Rezi, Dika, Yafie, Odi, Roji dukungan kalian memberikan kontribusi tak terhingga terhadap penelitian ini. Semoga kekeluargaan kita tetap dapat terjalin dengan baik.

14. Teman-teman HI UII angkatan 2016 yang telah berperan besar dalam pembentukan karakter dan membangun jalinan pertemanan yang solid. Semoga silaturahmi kita bisa tetap terjalin dengan baik.
15. Sahabat-sahabat Lampung, yang berada di Jogja dan di Kampung Halaman, yang selalu memberikan tempat ketika rindu untuk pulang.
16. Divisi SRD Komahi UII periode 2018-2019 Dini, Andhika, Ichan, Chikal, Meyliza, Amel, Novira, Dila dan Vallen yang telah banyak memberikan pengalaman dalam pembentukan karakter sebagai abang, teman dan saudara.
17. KOMAHI UII yang telah menjadi media penulis berproses dalam *self development* selama masa perkuliahan.



HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
Daftar Singkatan	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Signifikansi Penelitian	4
1.5. Cakupan Penelitian	5
1.6. Kajian Pustaka	5
1.7. Landasan Konseptual	8
1.8. Metode Penelitian	13
1.8.1. Jenis Penelitian	13
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian	14

1.8.3.	Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4.	Proses Penelitian.....	14
BAB II HUBUNGAN AS-TIBET DAN TIONGKOK DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI TIBET.....		
17		
2.1	Kasus Pelanggaran HAM di Tibet.....	17
2.2	Peran AS dalam kasus HAM di Tibet	23
BAB III ANALISIS <i>NATIONAL INTEREST</i> AS TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM DI TIBET.....		
27		
3.1	<i>World Order Interest U.S.</i>	28
3.2	<i>Economic Interest U.S.</i>	31
3.3	<i>Defence Interest U.S.</i>	42
3.4	<i>Ideological Interest U.S.</i>	46
BAB IV PENUTUP		
49		
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Rekomendasi.....	52
Daftar Pustaka.....		53

Daftar Singkatan

AS	: Amerika Serikat
ASCO	: Advance System and Concept Office
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICESCR	: International Covenant Economic Social and Cultural Rights
NATO	: The North Atlantic Treaty Organization
NPT	: Non-Ploliferation Treaty
USAID	: United States Agency for International Development
UU	: Undang-undang
WMD	: Weapons of Mass Destruction



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *national interest* yang diusung AS dalam menanggapi pelanggaran HAM di Tibet, hal tersebut disebabkan karena berlawanannya sikap perlindungan HAM Tiongkok terhadap masyarakat Tibet. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok khususnya untuk memajukan sektor ekonomi Tiongkok menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Tibet, pelanggaran tersebut ialah diskriminasi di bidang agama, budaya, buruh dan pendidikan. Dan pemerintah AS mendorong agar dilakukannya dialog berkelanjutan antara Tiongkok dan Tibet untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Berbicara mengenai *national interest*, penulis menggunakan konsep dari Donald E. Nuechterlein. Menurut Nuechterlein, *national interest* dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya ialah *defence interest*, *economic interest*, *world order interest* dan *ideological interest*. Konsep Nuechterlein membantu penulis dalam menganalisis mengapa AS menanggapi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok di Tibet.

Kata Kunci : AS, Tiongkok, Tibet, HAM, *National Interest*

ABSTRACT

This research aims to analyze the national interest that promoted by U.S. in responding to cases of human rights violations in Tibet, due to the opposing attitudes of Tiongkok's human rights protection toward the Tibetan people. The policies that taken by Tiongkok Government to advance economic sector led the human rights violations were discrimination of religion, culture, labor and education. US government encourages continued dialogue between Tiongkok and Tibet to resolve cases of human rights violation.

Speaking of national interest, the author uses a concept from Donald E. Nuechterlein. According to Nuechterlein, national interest is divided into 4 types, including defence interest, economic interest, world order interest and ideological interest. The concept of Nuechterlein assists author in analyzing why U.S. is responding the cases of human rights violation committed by Tiongkok in Tibet.

Keywords : *U.S., Tiongkok, Tibet, Human Rights and National Interest*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1776 AS menolak dengan tegas segala macam tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dimana hal ini dimuat dalam amandemen 1 *Bill of Rights* AS dan juga berdasarkan cita-cita salah satu presiden pendahulu AS yaitu, Woodrow Wilson untuk menyebarkan paham demokrasi dimana dunia dapat berhubungan secara damai dan jauh dari konflik, sehingga AS memiliki peran yang sangat vital dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM (Ottens, 2015).

Konflik antara Tiongkok dan Tibet sudah terjadi sejak lama, dimana Tiongkok berupaya untuk mengklaim Tibet dibawah kedaulatannya, Tiongkok melakukan pendekatan secara militer untuk melegitimasi kekuasaannya, sehingga tidak dapat disangkal bahwa dalam melakukan pendekatan tersebut Tiongkok melakukan pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap masyarakat Tibet ialah adanya diskriminasi di sektor agama, migrasi penduduk, pemisahan pada buruh dan pendidikan, pemusnahan lingkungan serta juga menentang kebebasan berpendapat (Lum, 2011, p. 5). Adanya peristiwa pelanggaran HAM di Tibet, membuat Kongres AS mengambil sikap dalam menghentikan tindakan diskriminatif Tiongkok pada Tibet, melalui upaya seperti sanksi, resolusi, dengar pendapat dan bantuan demokrasi dalam mendukung HAM di Tibet (Lum, 2011, p. 5).

Pada tahun 1965 Majelis Umum PBB menyampaikan resolusi untuk Tibet terkait *self determination* (Goldstein, 1997, p. 57). Dan pada tahun 2004 AS menjadi pelopor resolusi Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengkritik catatan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok. Namun hal tersebut direspon oleh Tiongkok dengan menghentikan dialog bilateral tentang HAM yang hendak digelar dalam tahun yang sama (Lum, 2011, p. 31). Sementara itu, Amerika Serikat mendesak Tiongkok agar berkomitmen dalam mengimplementasikan isi kovenan HAM internasional ICESCR yang sudah diratifikasi oleh Tiongkok. ICESCR tersebut disepakati dan diratifikasi pada tanggal 28 Februari 2001 (Dongfang, 2001).

Upaya AS menghentikan tekanan Tiongkok pada masyarakat Tibet telah diawali sejak tahun 1949, di masa pemerintahan Presiden Truman. Presiden Truman memberi balasan nota yang dikirim dari Dalai Lama 14 (Goldstein M. C., 1997, p. 10). Untuk menanggapi hal tersebut Presiden Truman membalas secara resmi pada deklarasi kenegaraan melalui Kedubes AS di New Delhi, India. Akan tetapi saat itu AS tidak dengan terbuka dalam memberikan balasan nota kepada Dalai Lama, hal ini dikarenakan Presiden Truman mempertimbangkan akan munculnya anggapan bahwa AS memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Tibet dan juga ditakutkan akan meningkatnya agresivitas Tiongkok terhadap masyarakat Tibet (Goldstein M. C., 1997, p. 40).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh AS bahwa Tibet menjadi bagian dari rekam jejak HAM Tiongkok ialah didasari oleh pertimbangan jika Tibet masih menjadi bagian wilayah Tiongkok. Dimana AS menuding pemerintah Tiongkok

mengenai sikapnya yang intoleran terhadap agama, memusnahkan warisan budaya Tibet, diskriminasi penduduk, serta merampas hak kemerdekaan penduduk Tibet dalam menyampaikan pendapat (Lum, 2011, p. 1).

Selain mendorong dan meminta Tiongkok untuk menghentikan tindakan yang menjadi pelanggaran HAM di Tibet, sejak tahun 1991 AS telah melaksanakan dialog diantara presiden AS dan pimpinan spiritual Tibet, Dalai Lama ke 14. Di tahun 2010 Presiden Obama menyambut dengan terbuka pertemuannya dengan Dalai Lama di Gedung Putih. Dimana dalam pertemuan tersebut Obama menyatakan dukungannya kepada Dalai Lama terkait identitas bangsa Tibet (Cooper, 2010).

Di periode pemerintahan Presiden Obama, tanggapan pada catatan HAM Tiongkok direspon dengan sangat hati-hati. Adapun tanggapan yang disampaikan hanyalah deklarasi kenegaraan yang isinya tentang rasa prihatin terkait pelanggaran HAM yang telah dijalankan Tiongkok di Tibet. Dan juga, Obama mendorong diselenggarakannya perundingan diantara pemerintah Tiongkok dan Dalai Lama 14 selaku pimpinan spiritual Tibet sesuai kebijakan *The Tibetan Policy Act of 2002* (Lum, 2011, p. 24).

1.2.Rumusan Masalah

Mengapa Presiden Barack Obama menanggapi kasus HAM yang ada di Tibet pada tahun 2009-2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui upaya Barack Obama dalam menanggapi pelanggaran HAM yang ada di Tibet.
2. Untuk menganalisis dinamika hubungan yang dihasilkan oleh AS di masa pemerintahan Barrack Obama terhadap pelanggaran HAM di Tibet.
3. Untuk mengetahui *national interest* Barack Obama dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Tibet.

1.4. Signifikansi Penelitian

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap masyarakat Tibet, ialah adanya diskriminasi di sektor agama, migrasi penduduk, buruh dan pendidikan, pemusnahan lingkungan serta juga menentang kebebasan berekspresi. Kemudian dalam menanggapi hal ini, AS meminta kepada Tiongkok untuk menghentikan tekanan dan diskriminasi terhadap masyarakat Tibet.

Penelitian ini penting untuk dibahas karena masih belum ada penelitian yang berfokus pada penggunaan konsep *national interest* AS terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tibet pada masa pemerintahan Barrack Obama, dimana AS memiliki citra sebagai polisi dunia dalam bidang HAM.

Serta penelitian ini untuk melengkapi penelitian yang sudah ada terkait peran AS dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Tibet pada masa pemerintahan Barrack Obama.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada rentang waktu 2009-2012, dimana tahun 2009 pemerintah AS mendesak Tiongkok untuk membuka kantor konsulat AS di Lhasa, ibukota Tibet. Hal ini bertujuan untuk melancarkan agenda AS dalam melakukan pengontrolan pada implementasi HAM di Tibet. Adapun rentang waktu pembatasan penulisan tahun 2012 ditentukan sebab di tahun tersebut pemerintah Tiongkok baru menanggapi permohonan untuk dibukanya kantor konsulat di Lhasa yakni memohon perihal yang sama, peresmian konsulat Tiongkok di Honolulu, Boston dan Atlanta.

1.6. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa buku dan literatur yang menggambarkan bagaimana posisi dan respon Amerika Serikat dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM dan juga beberapa hal lainnya yang dapat membantu menjelaskan topik penelitian yang dibuat oleh penulis.

Dalam tulisan "*Four Tradition Inform American Foreign Policy*" (Ottens, 2015) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh AS diadopsi dari pemikiran presiden terdahulu AS, salah satunya ialah Woodrow Wilson yang memiliki pandangan bahwa dunia harus bekerjasama dan berdemokrasi dengan adanya satu pemimpin, dalam hal ini Amerika Serikat sebagai pemimpin yang terpilih (*the choosen one*), percaya kebebasan individu, kebebasan demokrasi dan menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia dan internasionalisasi melalui demokrasi.

Kemudian dalam jurnal yang ditulis oleh James Meernik "*United States Military Intervention and The Promotion of Democracy*" menguraikan tentang alasan intervensi AS pada kepentingan internal negara lainnya untuk mempublikasikan demokrasi dengan metode yang cocok agar dapat diaplikasikan untuk meraih cita-cita demokrasi (Meernik, 1996, p. 391). Intervensi militer yang dijalankan AS menunjang naiknya demokratisasi di negara tempat intervensi dijalankan. Intervensi militer pada umumnya dijalankan agar dapat mengembangkan paham demokrasi. Adapun intervensi dilakukan untuk mencapai demokrasi (Meernik, 1996, p. 402). Penelitian James Meernik hanya berfokus pada penyebaran demokrasi yang dilakukan oleh AS dan upaya menghentikan pelanggaran HAM melalui intervensi militer. Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan motif yang dilakukan oleh Presiden Obama dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang dialami sebuah wilayah, terkait hal ini ialah Tibet, sedangkan James Meernik sekedar menjelaskan kesuksesan yang dijalankan AS, namun tidak mengulas secara mendalam *national interest* yang ingin dicapai AS dalam perannya menanggapi kasus pelanggaran HAM.

Senada dengan Meernik, pada tulisan Eytan Gilboa "*The Panama Invasion Revisited : Lesson for Use of Force in the Post Cold War Era*" mengungkapkan tentang invasi yang dilakukan AS ke Panama yang kurang berkaitan pada kondisi perang dingin saat itu (Gilboa, 1995, p. 539). Intervensi AS ke Panama bertujuan untuk menyebarkan demokrasi di negara tersebut serta melengserkan Presiden Noirega dari kewenangannya, Presiden Noriega ialah seorang pimpinan diktator yang korup, dan gaya kepemimpinannya menggunakan aturan narkomiliteristik.

Rezim narkomiliteristik dipandang AS perlu dilengserkan. Komitmen AS dalam memusnahkan peredaran narkoba di wilayah Amerika dapat terhalang karena Noriega ikut serta penjualan narkoba dan pencucian uang. Intervensi AS terhadap Panama disebabkan oleh kegiatan ilegal Noriega yang mengijinkan penjualan narkoba ilegal masuk wilayah kedaulatan AS. Adapun intervensi yang dilakukan oleh AS memiliki kepentingan lain, yaitu kepentingan strategis dalam memberantas penyebaran komunis Sandinista di Nikaragua (Gilboa, 1995, p. 560).

David L. Cingranelli dalam tulisannya "*Human Rights Practices and the Distribution of U.S. Foreign Aid to Latin American Countries*" menjelaskan bahwa bantuan luar negeri AS yang ditujukan kepada sejumlah negara di Amerika Selatan mayoritas dipakai dalam menyampaikan apresiasi pada aktivis HAM serta memberi hukuman untuk yang melanggar HAM. Pemberian bantuan ekonomi atas suksesnya penegakan HAM di sejumlah negara Amerika Selatan erat kaitannya dengan kebijakan HAM AS. HAM sebagai dasar untuk penyaluran bantuan luar negeri AS untuk sejumlah negara Amerika Selatan, karena isu HAM telah ditekankan dalam kongres mulai tahun 1970 (David L. Cingranelli & Thomas E. Pasquarello, 1985, pp. 107-109).

Selanjutnya dalam tulisan "*The Politics of United States Foreign Policy*" (Jerel A. Rossati & James M. Scott, 2012, p. 263) menjelaskan bagaimana penerapan *rational actor* AS yang di dalamnya terdapat piramida otoritas yang sifatnya *top down* sehingga Presiden menjadi dasar untuk mengambil kebijakan akhir, Presiden juga mendapatkan saran dan informasi dari penasehat dan birokrasinya, Presiden memutuskan kebijakan yang paling baik berdasarkan saran

dan informasi yang disampaikan dan kemudian Presiden menggunakan kuasanya untuk mengkoordinasikan kebijakan tersebut kepada staff dan kabinetnya.

Beberapa literatur di atas menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi dalam hubungan antara AS dengan negara yang memiliki catatan kasus pelanggaran HAM, namun belum ada penelitian yang spesifik membahas peran AS dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Tibet dengan konsep *national interest*, oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas secara spesifik bagaimana *national interest* AS yang ingin dicapai pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama.

1.7. Landasan Konseptual

Dalam konsep *national interest* negara memiliki peran sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memiliki peranan penting bagi masyarakatnya maupun dunia internasional. Dimana kehidupan masyarakat di suatu wilayah dipengaruhi oleh kepentingan suatu negara. *National interest* dibentuk berdasarkan kebutuhan suatu negara dilihat dari kondisi internalnya di berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, militer maupun sosial budaya. Dalam perspektif realisme, para ahli ilmu Hubungan Internasional menyepakati bahwa perilaku negara selalu dipengaruhi oleh *national interest*-nya. *National interest* juga menjadi dasar bagi setiap negara dalam berhubungan dengan negara–negara lain dalam struktur dunia yang anarki. Donald E. Nuechterlein menjelaskan bahwa *national interest* ialah kepentingan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat dan lingkungan disekitarnya. Adapun untuk memahami *national interest*, Nuechterlein kemudian membagi *national interest* menjadi 4 kepentingan yang dikenal dengan

basic national interest, dimana *basic national interest* yang Nuechterlein rumuskan merupakan himpunan dari banyaknya temuan empiris *national interest* di berbagai negara, sehingga kepentingan yang dituliskan juga dapat menggambarkan preferensi ideal dari sebuah kasus, yaitu sebagai berikut:

1. *Defence Interest* : Kepentingan untuk melindungi suatu negara dan masyarakatnya dari ancaman kekerasan dari negara lain, termasuk ancaman terhadap sistem pemerintahan.
2. *Economic Interest* : Kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. *World Order Interest* : Kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya agar tercipta kondisi yang aman, sehingga warganya dapat melakukan aktivitas dengan aman diluar batas negara.

4. *Ideological Interest* : Kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dan diyakini secara menyeluruh. Kepentingan ini berdasarkan pada nilai yang dianut oleh masyarakat di dalam suatu negara dan dianggap hal yang penting bagi negara, perilaku sebuah negara dalam konteks ideologi dapat dilihat dari seberapa besar dan kuat upaya dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianut.

(Nuechterlein, 1976, p. 248)

Nuechterlein juga berpendapat bahwa urutan dari empat kepentingan dasar diatas dapat berubah tergantung dari negara bersangkutan yang menentukan prioritas *national interest*-nya dengan catatan negara tersebut memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah dan warganya, baik melalui kekuatan militer atau memiliki aliansi yang kuat, sehingga negara tersebut dapat memprioritaskan *national interest* selain *defence interest*.

Konsep *national interest* yang dijelaskan oleh Donald E Nuechterlein dapat digunakan untuk melihat kepentingan AS di Tibet melalui hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dimana tingginya intensitas isu yang berhubungan dengan kepentingan internasional dapat menyebabkan sebuah negara melakukan

penataan terhadap kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami motif dibalik kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok di Tibet, perlu dilakukan analisis terhadap *national interest* AS dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Tibet. Nuechterlein kemudian menambahkan 4 kategori lain untuk memudahkan analisis dalam intensitas *national interest*, yaitu *survival issues*, *vital issues*, *major issues* dan *perispherical issues*.

Survival issues ialah isu-isu yang berhubungan dengan eksistensi negara. Dimana isu ini selalu berkaitan dengan intensitas terhadap *defence interest* yang dicirikan dengan adanya ancaman kekerasan fisik dari negara lain seperti misalnya krisis rudal Kuba 1962. *Vital issues* ialah isu-isu dimana akan terjadi kerugian yang serius jika negara tidak berupaya untuk melakukan tindakan berdasarkan perhitungan yang matang. Faktor pembeda antara *vital issues* dan *survival issues* ialah adanya waktu yang lebih panjang untuk mencari bantuan dari sekutunya ataupun *bargaining* pihak lawan, adapun intensitas dari *vital issues* umumnya mengacu kepada *economic interest*, *world order interest* dan terkadang *ideological interest*. *Major issues* ialah isu-isu yang umumnya terjadi dalam hubungan internasional dan dapat berpotensi menjadi *vital issues*, akan tetapi kemunculannya dapat dicegah dengan langkah-langkah korektif seperti melalui proses diplomasi. *Perishperal issues* ialah isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan negara, tetapi berhubungan dengan penduduk secara privat ataupun perusahaan yang beroperasi dalam sebuah negara (Nuechterlein, 1976, pp. 249-250).

<i>Basic interest</i>		<i>Intensity of interest</i>		
<i>U.S. involved</i>	<i>Survival</i>	<i>Vital</i>	<i>Major</i>	<i>Perishperal</i>
	<i>Defence</i>		X	
	<i>Economic</i>	X		
	<i>World order</i>	X		
	<i>Ideological</i>		X	

Penelitian ini akan menggunakan 4 kepentingan dasar *national interest* lebih dalam menurut Nuechterlein, yaitu *world order interest*, *economic interest*, *defence interest* dan *ideological interest* untuk menganalisis intensitas *national interest* AS yang diidentifikasi melalui *vital dan major issues* yang harus dilindungi oleh AS melalui perannya dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Tibet.

World order interest AS berdasarkan pada prinsip *grand strategy* Presiden Obama untuk membuat AS menjadi negara nomor 1 dunia, sementara itu Tiongkok mengalami perkembangan pesat dan memiliki pengaruh yang besar di Asia, dimana hal tersebut membuat AS khawatir akan hegemoninya di dunia, sehingga AS melakukan intervensi kasus pelanggaran HAM di Tibet dengan tujuan untuk menahan hegemoni Tiongkok.

Economic interest AS berdasarkan pada kebutuhan sumber bahan mineral, dimana produksi industri AS terus meningkat. Dan kebutuhan akan bahan mineral tersebut tersedia di Tibet, seperti krom, kobalt, minyak bumi dan gas. Dan juga letak geografis Tibet yang berdekatan dengan 5 negara poros dunia di Asia Tengah, sehingga AS menanggapi catatan kasus pelanggaran HAM Tiongkok di Tibet yang

bertujuan untuk menggoyahkan kekuasaan Tiongkok dalam memonopoli sumber bahan mineral di Tibet.

Defense interest AS berdasarkan pada kekhawatiran atas kemajuan sektor militer AS yang melakukan uji coba *anti satellite missile*, selain itu Tibet merupakan wilayah yang strategis bagi AS memperluas keanggotaan NATO di Asia Tengah dan juga untuk memposisikan misil di perbatasan kawasan tersebut, sehingga AS tidak perlu khawatir akan ancaman militer dari Rusia.

Ideological interest AS berdasarkan pada cita-cita AS untuk menyebarkan paham demokrasi di dunia. Pemerintahan Obama mengedepankan kepada aspek-aspek demokrasi, dimana pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok di Tibet tentunya melanggar aspek demokrasi, hal ini dikarenakan perbedaan paham antara AS dengan Tiongkok. Tiongkok memandang pelanggaran HAM di Tibet berdasarkan asas kesejahteraan yang berkaitan dengan ideologi Komunis, sehingga terdapat perbedaan dalam memahami hak asasi manusia.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah di atas ialah penelitian eksplanatif, dimana penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan mengapa suatu fenomena dapat terjadi yang merupakan implikasi atau pengaruh fenomena lain.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah *national interest* yang ingin dicapai oleh AS di masa pemerintahan Obama dan objeknya ialah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Tibet.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode deduktif, yang mana metode tersebut bersifat menghimpun data-data yang berkaitan pada penelitian. Kemudian data tersebut dianalisa oleh penulis dan dilanjutkan dengan mencari teori ataupun konsep yang dapat menjabarkan fenomena dalam penelitian ini.

1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian ialah tahapan yang penulis tempuh supaya bisa membantu penulis untuk melakukan penelitian, diawali oleh pra penelitian sampai laporan penelitian, adapun urgensi tahapan yang ditempuh penulis yaitu, agar penulis bisa menjalankan penelitian dengan baik serta terstruktur. Oleh karena itu penelitian ini dijalankan menggunakan beberapa tahapan :

1. Pra Penelitian

Pra penelitian meliputi aktivitas dan upaya untuk menyiapkan penelitian, seperti mengkaji hasil laporan yang sesuai dengan penelitian, membaca literatur yang ada kaitannya dengan penelitian serta penulis membatasi waktu dari tahun 2009-2012, yang mana dalam periode waktu

itu ada sejumlah kejadian penting yang bisa menunjang penulis dalam penelitian.

2. Pengambilan Data

Penelitian ini memperoleh data dari beragam media tulis, meliputi buku teks akademik, surat kabar harian dan media tertulis. Penentuan sumber data berdasarkan kredibilitas penulis dan relevansinya pada penelitian yang disusun oleh penulis.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya dari penulis ialah menganalisis data, dimana dalam analisis data dilakukan beberapa tahapan. Adapun tahapan dari penulis dalam menganalisis data diambil dari analisis data terhadap rancangan penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan tersebut ialah :

a) Mengorganisir dan menyiapkan data

Tahap ini dijalankan melalui pengumpulan semua data dari sumber yang sudah disampaikan.

b) Membaca semua data

Untuk memahami data tersebut, seluruh data yang sudah dihimpun serta dibaca dengan menyeluruh supaya menyelaraskan dengan sejumlah elemen data.

c) Mengaitkan tema

Tahap ini menunjang penulis dalam menyusun berdasarkan alur penelitian supaya penulisan semakin relevan antara tema dengan tulisan.

d) Interpretasi arti

Menginterpretasikan data yang sudah dihimpun untuk menjelaskan maksud tertentu. Dalam hal ini ialah catatan ataupun dokumen terkait.



BAB II

HUBUNGAN AS-TIBET DAN TIONGKOK DALAM KASUS HAM DI TIBET

Pada bab ini penelitian akan menjelaskan bagaimana kondisi Tibet dan juga beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok. Serta menjelaskan peran AS dalam memperhatikan pelanggaran HAM di Tibet.

2.1 Kasus Pelanggaran HAM di Tibet

Sekitar 5,4 juta jiwa penduduk asli yang berasal dari suku Tibet bertempat tinggal di daerah otonomi Tibet, selain itu penduduk Tibet juga mendiami daerah Sichuan, Yunnan, Qinghai dan Gansu. Masyarakat Tibet mempunyai bahasa serta huruf sendiri yang tidak sama dengan bahasa Tiongkok, dimana bahasa Tibet terklasifikasi dalam 3 logat, yaitu Weizang, Kang dan Amdo (Sperling, 2004, p. 10). Adapun huruf-huruf pada tulisan Tibet disebut dengan *Script* Tibet. Kemudian adat istiadat dan kehidupan dalam bermasyarakat suku Tibet terpengaruh dari mekanisme pemerintahan feodal perbudakan dengan kehidupan agamanya yang sangat kuat (Sperling, 2004, p. 11). Namun hal tersebut mulai berubah sejak 1951, dimana wilayah yang didiami suku Tibet lambat laun terbebas dari perbudakan, sampai tidak ada lagi daerah yang terikat dengan sistem feodal perbudakan di Tibet. Sehingga Tibet mengalami banyak kemajuan, dimana pemerintah Tiongkok mengenalkan beberapa kebijakan khusus, salah satunya ialah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di Tibet (Sperling, 2004, p. 12).

Di sisi lain, pelanggaran HAM yang dijalankan pemerintah Tiongkok di Tibet telah dimulai sejak 1950 pada saat Tiongkok menginvasi Tibet (Goldstein M. C., 1997, p. 40). Pada saat melakukan invasi, pemerintah Tiongkok mengintimidasi delegasi Tibet agar setuju dengan *the 17 points agreements* serta menerima Tibet tidak masuk otoritas Tiongkok. *17 points agreements* awalnya berdasarkan kebijakan Mao Tse Dong yang memiliki tujuan agar memberi Tibet otonominya sendiri (Goldstein M. C., 1997, p. 46). Hal ini dikarenakan setelah jatuhnya dinasti Qing, Tibet mendesak Tiongkok untuk merdeka dari kekuasaannya (Goldstein M. C., 1997, p. 47). Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan asumsi jika Tibet merupakan daerah yang terpisah dari Tiongkok sejak sebelum dinasti Qing dan bertujuan untuk membendung gerakan Tibet untuk memerdekakan diri. Mao Tse Dong mengajak pemerintah Tibet untuk bernegosiasi agar mendapatkan *win-win solution* (Goldstein M. C., 1997, p. 48). Dan Mao memberikan perjanjian yang memastikan masyarakat Tibet akan mendapatkan kebebasan dalam beragama. Dan pada saat pemerintah Tibet mengalami dilema tentang tawaran Mao itu, Mao menngarahkan pasukan Tiongkok untuk melakukan serangan ke Chamdo (Goldstein M. C., 1997, p. 48)

Akan tetapi pada saat itu Tibet sedang dalam kondisi yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mengatasi Tiongkok, oleh karenanya upaya yang dilakukan pemerintah Tibet ialah mengutus delegasi agar melakukan negosiasi dengan Tiongkok. Negosiasi itu berlangsung 23 Mei 1951 yang memperoleh hasil *the 17 points agreements* (Goldstein M. C., 1997, p. 49). Isi perjanjian tersebut ialah pemerintah Tibet harus mengakui bahwa Tibet menjadi bagian dari kedaulatan

Tiongkok. Dan sebagai ganti untuk perjanjian itu, Tiongkok setuju dalam memelihara Dalai Lama serta keutuhan mekanisme politik dan ekonomi tradisionalnya sampai pada saat masyarakat Tibet berkeinginan untuk melakukan reformasi.

Setelah terbentuknya *17 points agreements*, Mao menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk memajukan dan juga menghilangkan ketradisionalitas Tibet. Sehingga terjadilah beberapa kasus pelanggaran HAM (Goldstein M. C., 1997, p. 14) Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap masyarakat Tibet, ialah adanya diskriminasi di sektor agama, migrasi penduduk, pemisahan pada buruh dan pendidikan, pemusnahan lingkungan serta juga menentang kebebasan (Lum, 2011, p. 5).

Tahun 1949 merupakan awal mula terjadinya penindasan di bidang agama, dimana pemerintah Tiongkok menyebarkan propaganda yang berlawanan dengan opini publik jika agama Budha yang menjadi jati diri masyarakat Tibet ialah penghalang untuk kekuasaan Tiongkok di Tibet. Hal ini dikarenakan agama ialah musuh paling besar bagi pemerintah Tiongkok. Pasca terjadinya *Tibetan Uprising* pada tahun 1959, sekitar 1,2 juta masyarakat Tibet meninggal dikarenakan mengalami penindasan yang keji selama 20 tahun akibat kebijakan pemerintah Tiongkok yang sangat merugikan masyarakat Tibet. Dimana menurut perkiraan pemerintah Tibet di pengasingan, banyak masyarakat Tibet yang menderita saat dipenjara dan bekerja secara paksa. Selain itu pemerintah Tiongkok juga menghancurkan sekitar 6000 biara candi, bangunan budaya dan bersejarah. Hingga

kemudian simbol ataupun lambang keagamaan lainnya dipindahkan dari Tibet (Tibet, 2013).

Kebebasan dalam memeluk agama dijaga dalam Hukum Internasional. Dimana pada tanggal 10 Desember 1948 Pemerintah Tiongkok mengadopsi DUHAM yang menjaga kebebasan individu dalam memeluk agama (Sperling, 2004, p. 25). Di dalam pasal 18 DUHAM memberi hak untuk tiap orang dalam menjalankan ajaran agamanya, dengan personal bahkan organisasi. Pemerintah Tiongkok pun menyetujui kovenan internasional berbagai hak politik serta sipil yang menjaga kemerdekaan dalam memeluk agama sesuai pasal 18 (Sperling, 2004, p. 26). Hak kebebasan ataupun kemerdekaan terkait pemikiran, nurani serta agama menjadi *point* utama dalam pembahasan di Deklarasi PBB tentang penghapusan semua wujud intoleransi serta diskriminasi pada agama dan keyakinan serta konvensi terkait antisipasi serta sanksi pada kejahatan genosida, namun pada saat itu pemerintah Tiongkok belum menandatangani instrumen-instrumen tersebut. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada masyarakat Tibet secara tidak langsung telah melanggar *the 17 points agreements* dan juga deklarasi PBB yang menjaga kemerdekaan beragama.

Selanjutnya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok ialah pada saat masyarakat Tibet memperingati *Tibetan Uprising* pada tanggal 11 Maret 2008 di Lhasa. Dimana dalam peringatan tersebut 300 biksu melakukan demonstrasi dengan damai, dimana demonstrasi tersebut bertujuan untuk menuntut pembebasan tahanan di Tibet. Namun pada 15 Maret, demonstrasi di Lhasa berubah menjadi kekacauan, ketika pengunjung rasa Tibet berhadapan dengan polisi

Tiongkok dan kemudian membakar toko serta properti milik masyarakat Tionghoa Han. Pers Tiongkok melaporkan bahwa terdapat 19 orang Han menjadi korban jiwa dalam kerusuhan tersebut dan sekitar 200 orang Tibet menjadi korban jiwa atas tindakan militer Tiongkok, kemudian pengadilan Tiongkok menghukum 30 orang Tibet, termasuk 6 biksu diantaranya, hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara selama 3 tahun hingga seumur hidup berdasarkan peran mereka dalam kerusuhan yang terjadi di Lhasa (Thomas Lum & Hannah Fischer, 2010, p. 15). Sementara itu, tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap biara Kirti Tibet di provinsi Sichuan terus berlanjut, setelah terjadi kerusuhan disana pada awal tahun. Pada April 2011 pasukan keamanan Tiongkok menutup biara dan pusat budaya tersebut setelah seorang biarawan membakar dirinya sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Tibet. Dan juga polisi dilaporkan menahan 300 biksu secara paksa untuk menjalani indoktrinasi politik selama beberapa minggu dengan kedok “pendidikan hukum” (Watch, 2011).

Dan seiring dengan kemajuan pembangunan di Tibet, masyarakat Tibet tidak merasakan hasil dari pembangunan modern oleh pemerintah Tiongkok (Sperling, 2004, p. 20). Dan pembangunan tersebut berdampak pada terjadinya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dimana penduduk Tibet mengalami diskriminasi setelah makin banyaknya penduduk Han yang menetap di Tibet dan menyebabkan kesenjangan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan gaji yang diterima antara masyarakat Han dan masyarakat Tibet. Masyarakat Han yang menetap di Tibet mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada masyarakat Tibet serta mendapatkan waktu liburan yang lebih panjang

dan juga cuti dibiayai pemerintah Tiongkok (Sperling, 2004, p. 20). Terjadinya diskriminasi pekerja ini dikarenakan perpindahan masyarakat Han yang mau bekerja di Tibet tidak dapat dikontrol oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan UU pekerja di Tiongkok sejak tahun 1994 yang melarang segala bentuk diskriminasi untuk pekerja (Sperling, 2004, p. 20).

Pemerintah Tiongkok juga menggunakan suatu batasan tentang migrasi di Tibet. Dimana pemerintah Tiongkok menerapkan mekanisme pendaftaran keluarga sejak tahun 1950an, sistem tersebut mengelompokkan penduduk ke dalam level berbeda yang sesuai dengan tempat tinggal (Sperling, 2004, p. 15). Masyarakat Tibet terdaftar dalam suatu lokasi, biasanya ditempatkan di tempat lahir mereka dan berhak memiliki tempat tinggal disana. Bila masyarakat Tibet mau migrasi ke tempat lain walaupun dalam periode yang singkat, mereka perlu memperoleh persetujuan pemerintah setempat.

Selanjutnya, hasil dari invasi militer yang dilakukan Tiongkok di Tibet membuat lebih dari 1,2 juta masyarakat Tibet meninggal dunia, dimana Tiongkok yang menjalankan penghilangan mekanisme pada jati diri kebudayaan serta ciri-ciri masyarakat Tibet (Sperling, 2004, p. 10). Dan pada 14 Maret 2008 pemerintah Tiongkok menahan 672 orang yang ikut serta di gerakan massa dan 1 orang wartawan menjadi tawanan politik karena mereka mempublikasikan informasi tentang kondisi di Tibet sebagai akibat dari penolakan terhadap kebebasan berekspresi. (Lum, 2014, p. 13).

2.2 Peran AS dalam kasus HAM di Tibet

AS mendapat julukan sebagai polisi dunia dalam bidang HAM berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukannya kepada negara yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Dalam hal ini Kongres AS bertugas untuk memberikan dukungan pada Dalai Lama dan Tiongkok untuk bernegosiasi dan menyelesaikan permasalahan (Lum, 2011, p. 5). Dimana Kongres AS bersama Dalai Lama 14 sukses memperoleh dukungan bagi warga Tibet dari pemerintahan AS, yakni dengan terciptanya UU tentang Tibet di tahun 2002 (Lawrence, 2008, p. 17). Disamping terdapatnya UU tentang dukungan AS kepada Tibet. Pada era pemerintahan Clinton AS menerapkan kebijakan layanan Bahasa Tibet di stasiun radio Voice of Amerika pada tahun 1990 (Heil, 2003, p. 310). Dukungan pada Tibet telah jadi hukum publik di AS, dimana pemerintah AS memberikan beasiswa studi kepada 15 orang Tibet di universitas yang ada di Amerika (Heil, 2003, p. 311). Selanjutnya dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah AS ialah menyusun pos anggaran yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan (Heil, 2003, p. 312). Bantuan dana juga berasal dari lembaga non pemerintah yang mendukung dan memelihara lingkungan serta budaya Tibet dan memasarkan pembangunan berkelanjutan (Lum, 2014, p. 15).

Di tahun 1994, banyak pendukung Tibet di Kongres AS menyusun UU untuk membuat posisi Utusan Khusus untuk Tibet dengan tingkat kedutaan, hal ini dikarenakan pada saat itu AS belum memiliki konsulat di Tibet, sehingga terbentuklah suatu kebijakan yang fungsinya hampir sama dengan kedutaan. Dan tanggal 31 Oktober 1997 Presiden Clinton membuat Koordinator Khusus untuk Isu

Tibet (Dumbaugh, 2008, p. 18) untuk mempromosikan negosiasi antara Dalai Lama dengan pemerintah Tiongkok. Walaupun dengan tidak didampingi pejabat setara duta besar, hal itu sudah mengindikasikan perhatian yang lebih terpusat pada isu mengenai Tibet. Seluruh inisiatif legislatifnya tertera pada UU Kebijakan Tibet tahun 2002, yang disetujui jadi perundang-undangan oleh Presiden AS saat itu pada tanggal 30 September tahun 2002, yang menjadi bagian dari UU Hubungan Luar Negeri (Lawrence, 2008, p. 6).

Disamping memberi bantuan dana dan mempublikasikan undang-undang, AS juga secara tidak langsung mencari dukungan bagi Dalai Lama 14 supaya memperoleh bantuan dari pihak dunia secara global. Dimana secara tidak langsung AS sudah mengkampanyekan dukungan kemerdekaan Tibet dari Tiongkok. Dukungan tersebut tercermin dari jumlah publikasi yang banyak mengenai Dalai Lama yang menjadi pimpinan spiritual di Tibet. Begitupun dengan berita di media massa yang memfokuskan pelanggaran HAM pemerintah Tiongkok pada masyarakat Tibet di Tiongkok.

Dan juga terdapat organisasi yang dibawah oleh pemerintah yang secara khusus memberikan bantuan kepada masyarakat Tibet, yaitu *United States Agency for International Development (USAID)* (Lawrence, 2008, p. 10). Dimana kegiatan organisasi tersebut mempunyai tujuan untuk menawarkan pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi swasta melalui bidang pendidikan, pelatihan, bantuan teknis dan permodalan. Program pendidikan termasuk pelatihan kejuruan, pembelajaran mengenai keterampilan dan pemasaran, administrasi usaha dan beasiswa. Bantuan AS juga memberikan dukungan pada hasil panen, peternakan

dan produksi kerajinan tangan. Program yang lain yakni mencakup peningkatan usaha berskala kecil dan pusat bisnis. Dukungan modal ekonomi juga menunjang program dan layanan kesehatan dan kesadaran higienitas. Pada sisi lingkungan, dukungan AS memberikan bantuan pada warga Tibet untuk menjaga lingkungannya dengan cara konservasi, manajemen SDM berkelanjutan dan pembangunan alternatif SDM terbarukan. Program USAID pun menawarkan perlindungan margasatwa dan lahan produktif. Adapun usaha lainnya ialah menyadarkan masyarakat tentang perubahan iklim dan dampaknya di area lokal dan mengembangkan tindakan pada perubahan iklim. Dalam sektor pemeliharaan budaya, program USAID untuk penduduk Tibet ialah, program bahasa Tibet, pemeliharaan budaya lokal, warisan dan kesenian termasuk naskah kuno, buku dan tarian serta restorasi situs bangunan yang bernilai sejarah. (Lum, 2011, p. 33)

Selain menanggapi kasus pelanggaran HAM di Tibet, pemerintah AS juga berperan dalam menanggapi dan memberikan sanksi kepada Tiongkok atas insiden Tiananmen *Square* pada tahun 1989 dengan mengambil sikap melalui perwakilan lembaga keuangan internasional AS untuk memilih *abstain* atau tidak dalam urusan pinjaman ke Tiongkok (Lum, 2014, p. 6). Terjadinya Insiden Tiananmen *Square* pada tahun 1989 membuat hubungan antara AS dan Tiongkok memanas, hal ini dikarenakan pemerintah AS merasa geram dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yang mengerahkan militer untuk membendung aksi protes massa, dimana hal tersebut tentunya melanggar HAM. Aksi protes tersebut berawal dari sistem pemerintahan di masa Deng Xiaoping yang merenggut kebebasan demokrasi serta pemerintahannya yang korup (Topgyal, 2011, p. 25). Yang

kemudian membuat mahasiswa dan buruh tergerak untuk melakukan aksi protes. Pasca insiden tersebut pemerintah Tiongkok menolak untuk melakukan transparansi dan menutupi tindakannya yang melanggar HAM, sehingga menyebabkan hubungan antara AS dan Tiongkok merenggang.

Upaya perbaikan hubungan sudah dilakukan sejak tahun 1997, dengan dilakukannya pertemuan antara kedua pemimpin AS dan Tiongkok (Nagao, 2000, p. 27). Salah satu peningkatan hubungan antara keduanya ialah dibukanya negosiasi bilateral AS dengan Tiongkok di bidang HAM yang sebelumnya Tiongkok tak ingin berunding mengenai HAM dengan AS (Nagao, 2000, p. 29). Namun, apabila ditemukan beberapa aspek politis yang dapat merusak hubungan antara keduanya, maka tidak menutup kemungkinan AS akan mengambil sikap untuk menjalankan kembali kebijakan terkait pembendungan Tiongkok (Nagao, 2000, p. 30)

Dan kemudian berdasarkan dengan UU tentang Tibet yang sudah ditetapkan menjadi UU nasional di AS *The Tibetan Policy Act* yang disahkan pada tahun 2002. Dimana upaya pembentukan konsulat AS di Tibet pada masa pemerintahan Presiden Obama merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang tersebut. Konsulat AS direncanakan akan didirikan di ibu kota Tibet, yakni Lhasa (Dumbaugh, 2009, p. 5). Dimana hal ini ditujukan agar AS dapat mengontrol penjaminan HAM pada masyarakat Tibet yang dilaksanakan pemerintah Tiongkok. Dikarenakan dalam perundingan bilateral yang dilaksanakan dengan AS terkait HAM, Tiongkok menjanjikan akan selalu berusaha melakukan perbaikan catatan HAM-nya.

BAB III

ANALISIS *NATIONAL INTEREST* AS TERHADAP PELANGGARAN

HAM DI TIBET

Isu Tibet dalam dinamika hubungan antara AS dengan Tiongkok, khususnya dalam bidang HAM sudah menjadi rahasia umum dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan isu tersebut sudah menjadi suatu permasalahan multidimensi yang terjadi di dunia (Sautman, 1998). Meskipun Tiongkok memiliki ketegasan dalam menentang semua partisipasi asing terkait persoalan Tibet dan juga menjabarkan suasana yang terkait dengan yang terjadi di Taiwan. Tibet memiliki perbedaan yang sangat jelas. Dimana Taiwan letak geografisnya tidak menyatu dengan daratan Tiongkok dan juga mempunyai level politik yang rendah bila adanya partisipasi politik dari negara luar. Sedangkan Tibet mempunyai keterikatan sejarah yang kuat dengan daratan Tiongkok, sehingga membuat Tibet tak bisa digunakan sebagai wilayah politis bagi negara lain (Sautman, 1998).

Barry Sautman menyatakan bahwa, keterlibatan AS di Tibet memiliki alasan yang nyata. Dalam hal ini, alasan tersebut ialah didasari oleh kepedulian masyarakat AS terhadap isu HAM di Tibet, sehingga membuat pemerintah AS bergerak untuk mengawasi kondisi HAM di Tibet. Dimana AS memiliki peran menjadi mediator terkait isu pelanggaran HAM yang dilaksanakan Tiongkok di Tibet. Dan hal tersebut juga dilaksanakan AS pada isu HAM yang berlangsung di Afghanistan. Hal ini pula yang kemudian semakin menguatkan citra AS sebagai polisi dunia dalam bidang HAM. Selain itu, Sautman pun mengungkapkan jika

intervensi AS terkait HAM di Tibet ialah upaya AS untuk memelihara hegemoninya di dunia (Sautman, 1998).

Pada bab ini penelitian akan menggunakan konsep *national interest* yang berusaha untuk mengidentifikasi *basic national interest* AS dan menjelaskan alasan mengapa Obama menanggapi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok kepada Tibet untuk mencapai tujuan *national interest* AS dengan melihat 3 sektor, yaitu *world order interest*, *economic interest* dan *defence interest*.

3.1 World Order Interest U.S.

Dalam kepemimpinannya, Presiden Obama memiliki pola *grand strategy* melalui pendekatan *selective engagement* untuk membuat kebijakan luar negeri, dimana *national interest* merupakan indikator utama dalam *grand strategy* AS. Dalam hal ini, Presiden Obama berfokus pada restorasi AS dan memperkuat hubungan kerjasama melalui multilateralisme. Dimana dengan perkembangan pesat yang dialami oleh Tiongkok, khususnya dalam sektor ekonomi, membuat Obama mengalokasikan sumber daya yang lebih di kawasan Asia melalui strategi *Pivot to Asia* yang bertujuan untuk menahan pengaruh Tiongkok kepada negara-negara di kawasan Asia. (Montemalo, 2016).

AS mengedepankan aspek-aspek demokrasi dan HAM, dimana dengan kepentingan tersebut yang membuat AS harus merespon segala potensi ancaman terhadap upaya untuk merestorasi kepemimpinan dan semakin terlibat di kawasan, dan ancaman nyata yang dirasakan oleh AS saat ini ialah Tiongkok dengan

pengaruhnya di kawasan Asia, yang kemudian tertulis dalam *national security strategy* 2010 :

“We must focus American engagement on strengthening international institutions and galvanizing the collective action that can serve common interest such as combating violent extremism; stopping the spread of nuclear weapons and securing nuclear materials; achieving balanced and sustainable economic growth; and forging cooperative solutions to the threat of climate change, armed conflict, and pandemic disease. The starting point for that collective action will be our engagement with other countries” (National Security Strategy, 2010, p. 3).

Kemudian kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Obama terkait isu Tibet bersifat persuasif. Dimana AS berperan untuk mendorong dilaksanakan diskusi yang bertujuan untuk perbaikan HAM antara Dalai Lama 14 dan Tiongkok. Kebijakan tersebut tercermin dari sikap Presiden Obama melalui konferensi kenegaraan. Obama memberlakukan kebijakan tersebut sebab AS sangat menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok. Namun AS juga mempunyai fokus yang besar pada penyelesaian perbedaan yang terjadi antara Dalai Lama dan Tiongkok.

Hubungan politis antara AS dengan Dalai Lama sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Truman pada tahun 1949. Dimana pada saat itu Presiden Truman memberikan balasan nota yang dikirim Dalai Lama 14 melalui pernyataan resmi negara di Kedubes AS di New Delhi, India (Goldstein M. C., 1997, p. 10) Akan tetapi pada saat itu AS tidak dengan langsung memberikan balasan nota Dalai

Lama, hal ini dikarenakan Truman mempertimbangkan akan munculnya anggapan bahwa AS telah mengakui kemerdekaan Tibet (Goldstein M. C., 1997, p. 14) disamping hal tersebut, pertimbangan yang lain ialah ditakutkan akan meningkatnya agresivitas Tiongkok terhadap masyarakat Tibet.

Kemudian di tahun 2010 dilakukan pertemuan antara Presiden Obama dengan Dalai Lama di Gedung Putih, meskipun pada saat itu hubungan AS dengan Tiongkok sedang mengalami ketegangan karena penjualan senjata AS kepada Taiwan. Pada saat pertemuan, Presiden Obama memuji Dalai Lama terkait sikap anti kekerasan dan usaha dalam melakukan dialog dengan otoritas Tiongkok yang dibalas oleh Dalai Lama melalui pernyataan kepada Obama bahwa dia kagum dengan AS karena menjadi pahlawan demokrasi, kebebasan, nilai-nilai kemanusiaan dan kreatifitas. Di pertemuan itu Presiden Obama juga menyatakan dukungan yang kuat kepada Dalai Lama terkait jati diri bangsa Tibet (Cooper, 2010).

Hal ini yang kemudian membuat AS mendapat kecaman dari Tiongkok karena melakukan pertemuan dengan Dalai Lama, yang dikhawatirkan akan merusak hubungan Tiongkok dengan AS, dimana sejak tahun 1950 pada saat Tiongkok menguasai Tibet. Tiongkok memandang bahwa Dalai Lama merupakan tokoh separatis dan mendorong para pemimpin dunia untuk tidak menemuinya. Namun AS menepis kecaman tersebut dengan menyatakan bahwa pertemuan Obama dengan Dalai Lama merupakan pertemuan pribadi dan bukan pertemuan politik, dimana pertemuan dilakukan secara tertutup di Ruang Peta Gedung Putih dan bukan di Ruang Oval kantor Presiden AS (Cooper, 2010).

Selanjutnya di era pemerintahan Presiden Barrack Obama, berbagai respon pada catatan HAM oleh Tiongkok ditanggapi dengan penuh kehati-hatian. Adapun reaksi yang dilakukan hanyalah penyampaian kenegaraan yang isinya ialah wujud keprihatinan terkait dengan pelanggaran HAM yang telah dilaksanakan Tiongkok di Tibet (Fischer T. L., 2010).

Penulis menganalisis bahwa AS memiliki *vital issues* di sektor politik yang didasari oleh *grand strategy* AS, yang bertujuan membuat AS sebagai negara nomor satu dunia, namun di sisi lain Tiongkok mulai memperkuat pengaruhnya di dunia, sehingga membuat AS khawatir akan terancamnya hegemoni AS di dunia. Sementara upaya yang terus dilakukan AS terhadap perlindungan HAM-nya di Tibet ialah agar Tibet mendapatkan kesejahteraan di wilayahnya sendiri. Dan juga bertujuan untuk menahan laju pengaruh Tiongkok mendominasi dunia, sehingga AS sangat menjaga hubungan politisnya dengan Dalai Lama 14 pemimpin spiritual Tibet.

3.2 Economic Interest U.S.

Tiongkok menjadi negara paling besar di Asia yang sekarang ini merupakan kekuatan baru yang bisa jadi sebuah ancaman untuk hegemoni AS. Dibandingkan Tiongkok yang dulu, keadaan Tiongkok saat ini sudah jauh sangat berbeda dan tidak seperti dulu lagi, entah itu dalam hal ekonomi, politik, dan aspek yang lain. Perkembangan yang didapatkan Tiongkok ialah sebuah hal yang nyata yang harus diperhatikan oleh AS. Tiongkok dinilai akan jadi negara *superpower* baru yang mempunyai potensi di era mendatang (Jacques, 2009). Hal tersebut memungkinkan bahwa Tiongkok akan jadi pemimpin yang kuat di kawasan Asia dan dunia secara

global, tentu saja hal tersebut sangat mengancam rival utamanya yakni Amerika Serikat.

Pada saat dunia dilanda krisis ekonomi dan runtuhnya berbagai perusahaan finansial paling besar di AS misalnya saja Wall Street di tahun 2008, menggambarkan pergerakan kekuatan ekonomi di Barat, dengan berbagai perusahaan besar yang tumbang dan berupaya mendapatkan dukungan secara keuangan dari banyak negara. Pada waktu itu pemerintah AS terjun langsung untuk menyelamatkan banyak perusahaan, diantaranya dengan menyakinkan banyak negara misalnya Tiongkok yang jadi konsumen khusus bagi perusahaan seperti Freddie Mac dan Fannie Mae milik AS. Hal itu ditempuh AS untuk mengantisipasi supaya Tiongkok tidak menarik dananya, jika hal tersebut dilakukan dapat dipastikan akan mempercepat jatuhnya nilai tukar dollar. (Jacques, 2009, p. 2).

Pengukuran lainnya yang menggambarkan semakin kuatnya pengaruh Tiongkok pada dunia yaitu terlihat dari berbagai kelebihan yang dimiliki pada kerjasama dengan AS, dimana terdapat kesenjangan dalam ekonomi dan hubungannya. Tiongkok merupakan eksportir paling besar bagi AS dan warganya begitu menikmati produk-produk yang diproduksi oleh Tiongkok. Kemudian pada waktu ekspor AS ke Tiongkok cukup rendah Tiongkok justru mendapatkan penambahan neraca perdagangan dan selalu bertambah semenjak tahun 1999. Dengan begitu Tiongkok melakukan investasi terhadap surplusnya tersebut dengan bermacam bentuk surat hutang AS, entah itu berbentuk *treasury bond*, *agency bonds*, dan obligasi korporasi (Jacques, 2009, p. 189).

Selanjutnya di tahun yang sama, Tiongkok mempunyai total cadangan devisa lebih dari 1.81 triliun dollar AS, nilai yang lebih besar dari negara yang lain. Hal tersebut menjadikannya raksasa dalam bidang keuangan dunia (Jacques, 2009, p. 189). Kontribusi Tiongkok sangat dirasakan ketika sektor keuangan Barat mengalami keterpurukan, sehingga secara tidak langsung memposisikan Tiongkok dalam posisi yang sangat berpotensi kuat dalam mengembangkan pengaruh ekonominya di kancah dunia, seperti halnya melalui pembelian berbagai perusahaan asing, terutama perusahaan yang bergerak dalam sektor mineral dan minyak.

Vital issues AS di sektor ekonomi ialah untuk kesejahteraan warga negaranya yang dapat dilihat dari meningkatnya keperluan akan sumber mineral dan minyak bumi di AS. Di sisi lain, Tibet sebagai daerah yang kaya akan berbagai mineral dan menjadi sumber mineral utama bagi Tiongkok. Ada bermacam sumber mineral yang diperlukan AS di Tibet. Dimana bahannya itu diperlukan Tiongkok dalam segi pembangunan nasional di negaranya untuk menambah pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Begitu banyak bahan mineral yang ada di Tibet dan eksploitasi sumber daya alamnya membuat AS khawatir dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Ditambah dengan sumber mineral yang mulai mengalami kelangkaan di AS seperti, krom, kobalt, dan berbagai logam platinum (Jones, 1988). Bahan-bahan mineral yang tersedia di Tibet yaitu, uranium dan sodium, sedangkan yang lain ialah, krom, aluminium, kristal, tembaga, logam, sulfur, mika, litium menjadi bahan reaktor nuklir, besi, grafit, emas dan minyak bumi.

Bahan-bahan mineral yang diproduksi oleh Tibet seperti, krom, tembaga, emas, minyak bumi dan gas alam serta uranium. Adapun hasil datanya ialah sebagai berikut :

1. Cadangan krom di Tibet ialah yang paling besar di Tiongkok, yakni sekitar 40% dari total cadangan krom Tiongkok secara menyeluruh. Mengacu dari data terakhir dalam kurun waktu 1991-1995 krom yang dihasilkan sebanyak 450.000 ton. Dan sejak tahun 2000 produksi krom menjadi lebih terjadwal, dimana setiap tahunnya menghasilkan 50.000 ton. Tempat penambangan krom di Tibet bernama Norbusa Chromite Mine yang berlokasi di Lhoka, 3,700-5000 meter diatas permukaan laut, disepanjang sungai Yarlung Tsangpo yang mengandung lebih dari 57% krom oksidasi yang menjadi salah satu cadangan yang paling baik yang ada di dunia.
2. Tibet mempunyai cadangan tembaga sekitar 7.14 juta ton yang sejak tahun 2010 menghasilkan 100.000 ton setiap tahunnya. Nama tempat penambangan tembaga di Tibet ialah *Yulong Copper Mine* yang berlokasi di Jomda County, Chamdo. Dengan luas area sepanjang 400 km dan lebar sebesar 30-70 km. Penambangan yang terluas dan sangat bernilai di Tibet dan merupakan salah satu tambang tembaga terluas di dunia.
3. Penambangan emas di Tibet ditemukan di daerah Amdo. Banyaknya produksi emasnya di tahun 1997 sekitar 827.5 kg dan kurang lebih bisa menghasilkan 100 kg pertahun.

4. Penambangan minyak bumi dan gas alam ditemukan oleh ahli geologi Tiongkok di daerah Tsaindam Basin di Amdo. Banyaknya cadangan minyak bumi di daerah tersebut sekitar 4.2 milyar ton dan cadangan gasnya sekitar 1.500 milyar kubik.
5. Di tahun 1990 menemukan sebanyak 200 titik cadangan uranium di Tibet. Lokasi penambangannya terletak di daerah Thewo Provinsi Gansu, Yamdrok Iso dan Dhamsung di Lhasa (Mineral And Mining, 2014)

Tidak hanya posisi geografisnya yang berbatasan dengan India, dengan bahan-bahan mineral tersebut membuat Tibet menjadi wilayah yang bernilai strategis bagi Tiongkok. Dan jika melihat lebih jauh lagi *national interest* AS terhadap Tibet ialah supaya kondisi Tiongkok tidak stabil. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan AS kepada Tibet yang bertujuan untuk menahan Tiongkok dari akses surplus penting minyak bumi dan gas alam serta berbagai bahan mineral yang lain. Selain itu, disebabkan juga dengan ketergantungan AS pada kebutuhan mineral non migas, yang dapat disimpulkan menjadi 4 faktor :

1. Peningkatan kebutuhan bahan mineral untuk industri atau pertahanan.
2. Minimnya cadangan mineral di dalam negeri.
3. Minimnya potensi dalam mengembangkan sumber daya pengganti mineral.
4. Tidak adanya ketersediaan sumber mineral yang lebih aman dan energi alternatif yang akan menopang kebutuhan tersebut (Jones, 1988, p. 223).

Ditambah dengan tingginya konsumsi berbagai bahan mentah dunia yang didominasi oleh AS, beberapa negara Eropa dan Jepang, yang memberi sumbangan pada menurunnya ketersediaan berbagai bahan mineral dunia dan konsumsinya diprediksi akan selalu bertambah (Jones, 1988, p. 242). Berbagai produk mineralnya itu digunakan menjadi bahan baku teknologi industri, energi dan pertahanan serta berbagai produk konsumen yang mempunyai teknologi yang maju dikarenakan standar hidup masyarakat modern. Dengan kondisi tersebut, industri dunia sedang mengalami peralihan masa eksploitasi berbagai bahan mineral yang akan mengarah pada masa kelangkaan bahan mineral. Hal ini menjadi sebuah perubahan yang sangat fundamental bagi dunia pasar bahan mentah yang mempengaruhi bagaimana kepentingan AS. Dimana AS akan menghadapi persaingan yang ketat dalam mendapatkan akses untuk bahan mineral dengan negara yang berkembang atau industri lainnya yang sedang mengalami peningkatan dalam sektor ekonominya (Jones, 1988, p. 223). Dalam hal ini negara tersebut ialah Tiongkok yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Di sisi lain, AS berupaya untuk mencukupi kelangkaan bahan mineral domestiknya, akan tetapi AS mendapatkan hambatan yakni sumber bahan-bahan mineral yang minim dan biaya penambangannya mengalami peningkatan (Jones, 1988, p. 239). Dengan begitu, AS sangat menggantungkan pada ketersediaan bahan mineral dari negara lain dan harus siap dengan konsekuensi defisitnya perdagangan dalam sektor bahan material mineral dan berupaya untuk mendapatkan sumber mineral guna mencukupi kebutuhan dalam negerinya dengan harga yang terjangkau dan tidak menggantungkan impornya.

Konsumsi minyak bumi di AS telah menurun sejak tahun 2005. Penurunan konsumsi di AS pada tahun 2008 dan 2009 dikarenakan terjadinya pelemahan ekonomi. Dan pada tahun 2010 terdapat peningkatan konsumsi minyak bumi, dimana hal itu mencerminkan kondisi perekonomian yang membaik. Akan tetapi pada tahun 2011 dan 2012, harga minyak yang lebih tinggi dan peningkatan efisiensi bahan bakar kendaraan ringan sangat berkontribusi pada penurunan konsumsi AS. Konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, yang menyumbang hampir setengah dari total konsumsi bahan bakar cairan AS, turun 290.000 barel per hari antara tahun 2010 dan 2012 dikarenakan standar Ekonomi Bahan Bakar Rata-Rata Perusahaan mengarah pada peningkatan penghematan bahan bakar kendaraan yang melampaui pertumbuhan perjalanan jalan raya. Sementara itu, pada tahun 2009, Asia melampaui AS sebagai wilayah konsumen minyak bumi terbesar di dunia karena konsumsi kembali pulih dari penurunan tahun 2008. Antara 2008 dan 2012, konsumsi minyak bumi di Asia meningkat 4,4 juta barel per hari. Dalam hal ini ekonomi industri Tiongkok yang pesat mendorong sebagian besar peningkatan permintaan di Asia, dimana konsumsi minyak bumi Tiongkok tumbuh 2,8 juta barel per hari. Dan jika konsumsi atau penggunaan minyak bumi di Tiongkok terus tumbuh seperti yang diproyeksikan, maka diperkirakan Tiongkok akan menggantikan AS sebagai pengimpor minyak bersih terbesar di dunia pada musim gugur ini (Energy, 2013)

Selain itu, sektor ekonomi Tiongkok yang berkembang secara pesat juga turut memberikan pengaruh dalam hubungan AS dengan Tiongkok. Dimana total perdagangan keduanya telah meningkat menjadi U\$ 285,3 miliar di tahun 2006,

dengan lebih dari 60.702 kali peningkatan dibanding tahun 1971. Dan pada Januari 2009, Tiongkok menjadi partner dagang yang paling besar keempat di pasar ekspor dan kedua paling besar dalam sumber impor. (Wang, 2010, p. 167)

Produk impor Tiongkok dengan harga yang murah sudah menambah daya beli masyarakat di negara AS. Berbagai perusahaan yang ada di AS mempunyai operasi manufaktur yang besar di Tiongkok untuk memperjual belikan produknya di pasaran (Jacques, 2009, p. 327). Tingkat ekonomi Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat cepat sebab Tiongkok sanggup mendapatkan laba dari insentif kerja yang murah untuk produk ekspor. Walaupun pertumbuhan ekonominya yang begitu cepat tersebut mengancam perekonomian negaranya, akan tetapi AS terus mempertahankan kerjasama demi menumbuhkan ekonomi AS yang terdampak krisis global yang terjadi di tahun 2008.

Table 1. Tiongkok's Average Annual Real GDP Growth : 1960-2010 and 2011 Estimate

Time Period	Average Annual Growth (%)
1960-1978 (pre-reform)	5.3
1979-2007 (post-reform)	9.8
1990	3.8
1991	9.3
1992	14.2

1993	14.0
1994	13.1
1995	10.9
1996	10.0
1997	9.3
1998	7.8
1999	7.6
2000	8.4
2001	8,3
2002	9.1
2003	10.0
2004	10.1
2005	9.9
2006	11.1
2007	14.2
2008	9.6
2009	9.8
2010	10.3
2011 IMF Projection	9.6

Sumber : (Morrison, 2011, p. 4)

Tabel 1 menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mulai meningkat sejak terjadinya reformasi ekonomi. Tiongkok mengalami kemajuan yang signifikan dalam sektor perekonomiannya dan menjadi salah satu negara dengan peningkatan ekonomi yang begitu cepat. Semenjak tahun 1960 sampai 1978 peningkatan penghasilan kotor domestik riil Tiongkok sekitar 5.3% pertahun-nya. Akan tetapi, setelah mengalami reformasi di tahun 1979-sekarang Tiongkok mengalami pertumbuhan sekitar 10%, hal ini yang kemudian yang membuktikan bahwa Tiongkok mampu meningkatkan presentase peningkatan ekonominya secara riil setiap 8 tahun (Morrison, 2011, p. 3). Pertumbuhan dan reformasi ekonomi di Tiongkok bisa menguntungkan perekonomian AS. Hal ini dilihat dari perekonomian Tiongkok yang sedang mengalami pertumbuhan dengan pesat dan memiliki populasi penduduk terbanyak dan membutuhkan pembangunan nasional sehingga menjadikan Tiongkok sebagai pasar yang mempunyai peluang besar bagi AS. Tiongkok merupakan sumber impor kedua yang paling besar bagi AS. Barang-barang impor murah dari Tiongkok menunjang AS untuk mempertahankan laju inflasi negaranya. Dikarenakan peningkatan daya beli dan banyaknya barang-barang dipasaran. Hal tersebut menjadikan AS mempunyai kelebihan komparatif atas produksi produk dan jasa. Dimana secara tidak langsung Tiongkok membantu dalam menutupi kekurangan biaya federal AS. Dengan demikian dapat menjaga suku bunga agar selalu kecil.

Berdasarkan data terkait pertumbuhan ekonomi Tiongkok, penulis menganalisis bahwa hal itu akan sangat mempengaruhi kebijakan AS pada berbagai isu di negara Tiongkok. Salah satunya ialah pelanggaran HAM oleh pemerintah

Tiongkok pada masyarakat Tibet. Dan di lain sisi, bertentangan dengan Tiongkok bukan menjadi opsi untuk AS. Hal itu dikarenakan potensi sumber mineral di Tibet dan bergantungnya AS dengan ekonomi perdagangan Tiongkok, dan juga dukungan Tiongkok terhadap sanksi yang diberikan kepada negara Iran (MacAskill, 2010).

Dan juga sektor ekonomi ialah pertimbangan fundamental untuk berbagai kebijakan yang dipilih oleh Obama. Hal tersebut memperlihatkan *national interest* AS ialah hal utama kebijakan AS dalam menanggapi isu HAM di Tibet. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sangat berbanding terbalik dengan perlindungan HAM kepada masyarakat Tibet. Dengan perkembangannya yang pesat dalam perekonomiannya Tiongkok menjadi pemimpin di antara negara-negara berkembang lainnya khususnya di kawasan Asia. Dan melalui sektor ekonomi tersebut membuat Tiongkok menjadi ancaman terhadap dominasi AS dan membuat struktur dunia menjadi multipolar (Mearsheimer, 2006, p. 80). Sehingga dapat diasumsikan bahwa Tiongkok mulai menjadi saingan AS dalam hegemoni dunia melalui sektor ekonomi, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dimana AS menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sementara Tiongkok tidak. Berubahnya struktur internasional tersebut diperkirakan akan mengundang tensi ketidakpercayaan dan konflik AS dengan Tiongkok akibat peralihan kekuatan. Dengan begitu, biarpun AS tidak bisa menghentikan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok, akan tetapi AS bisa menghalangi dan menahan dominasi Tiongkok di kancah dunia melalui intervensinya dalam kasus pelanggaran HAM di Tibet.

3.3 Defence Interest U.S.

Hubungan pada sektor militer antara AS dengan Tiongkok disebabkan oleh AS yang menganggap bahwa Tiongkok akan menjadi ancaman, khususnya pada kemajuan kekuatan militer Tiongkok dalam mengawasi mobilitas militer terutama di Asia Timur. Sehingga AS membuat sebuah badan koordinasi khusus yang menangani stabilitas dan penilaian di kawasan Asia Timur yakni ASCO yang bertujuan untuk sektor keamanan. khususnya pada risiko pemakaian senjata nuklir berjangka panjang dan pemakaian senjata balistik di Asia (Roberts, 2001).

Selanjutnya melalui *National Security Strategy*, strategi *arms control* terhadap Tiongkok guna menjaga keamanan strategis dan urusannya di lingkup Asia dan internasional pada umumnya terkait modernisasi militer Tiongkok. Dibawah pengawasannya kemudian AS bekerjasama dengan Tiongkok khususnya dalam pemakaian bahan nuklir terkait persenjataan konvensional, AS menghalangi Tiongkok memproduksi senjata nuklir dan menegaskan pemakaian nuklir bertujuan damai dan media *deterrence* melalui pemanfaatan kekuatan institusi AS yakni ratifikasi Tiongkok kepada nuklir *Non-Proliferation Treaty* (NPT) (Medeiros, 2000, p. 68).

Pendekatan dan kerjasama militer pada angkatan darat, udara dan laut, tujuannya untuk mengontrol modernisasi pasukan militer Tiongkok. kebijakan *Joint Military Operations Program* yang dibuat oleh AS oleh Tiongkok melalui kerjasama *open sky* (Meyer, 2002, p. 445), yakni militer AS bisa mengudara ke kawasan Tiongkok yang bertujuan damai dan kebalikannya. Namun tujuan lain dari AS ialah untuk memonitor kekuatan Tiongkok yang diprediksi mengganggu

dominasi kekuatan militer AS khususnya dalam mengembangkan teknologi bersenjata dan pemakaian rudal balistik, seperti pada tahun 2007 dimana Tiongkok melakukan uji coba misil anti satelit (Kan, 2007, p. 3) Dengan bekerjasama bersama Tiongkok tujuannya menggiring Tiongkok untuk memprioritaskan kedamaian dan memastikan senjata yang dimiliki tidak dipergunakan untuk mengancam dan terdapat konsentrasi keamanan alat bersenjata di kawasan Asia. Tiongkok sebagai modal AS untuk memperoleh jalan militer ke kawasan Korea Utara dan Iran, dikarenakan Tiongkok mempunyai pintu yang tergolong mudah bagi negara bersangkutan.

Berdasarkan perkembangannya yang cepat dalam sektor ekonomi, Tiongkok melakukan modernisasi militer yang dilaksanakan mulai akhir tahun 1990an (Swaine, 2013, p. 48). Modernisasi militer ini dilaksanakan melalui penambahan pada dana anggaran untuk pertahanan, modernisasi senjata dan meningkatkan keahlian pasukan militer Tiongkok. Industri pertahanan di Tiongkok juga ditingkatkan. Sekarang ini pasukan militer Tiongkok bisa mengungguli kekuatan militer AS. AS merasa khawatir jika hal tersebut akan mengakibatkan keagresifan Tiongkok kepada penduduk Tibet. Sehingga AS mengintervensi dalam masalah pelanggaran HAM di Tibet.

Usaha yang dilakukan AS dalam mengembalikan kebudayaan Tibet dan jaminan HAM, dipandang sebagai usaha untuk memelihara hegemoni dunia dan tidak sekedar menyebarkan demokrasi. Hal ini dikarenakan aspek geopolitik. Dimana jika Tiongkok mendiamkan Tibet di bawah AS, maka AS akan berpengaruh di Asia Tengah. Dan apabila Tibet dalam penguasaan AS, sudah tentu

pengaruhnya akan meningkat di Asia Tengah, dan juga berpeluang untuk mengikut sertakan Ukraina dan Georgia ke dalam anggota *The North Atlantic Treaty Organization*. Disamping itu, AS juga bisa memposisikan misil-misilnya di wilayah perbatasan Rusia. Dan sebagai usaha perlindungan terhadap penyerangan nuklir Iran ke AS.

Hal ini makin jelas dengan posisi geografisnya Tibet yang berada di sebagian kawasan Asia Tengah, dikarenakan Tibet, Xinjiang dan provinsi Qinghai menjadi kawasan Tiongkok yang terletak di Asia Tengah dan memiliki batas wilayah dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah. Dan layaknya kawasan strategis lain wilayah Tibet dapat digunakan sebagai pangkalan militer AS. Adapun tujuan AS ialah untuk menghalangi kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang makin besar di Asia Tengah.

Guna menjamin keamanannya, AS bertekad memperluas keanggotaan *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Setelah Uni Soviet runtuh, AS dan beberapa negara Barat lainnya mendeklarasikan program perluasan NATO ke Eropa Timur, Eropa Tengah dan Asia Tengah (Assl, 2012). Target perluasan NATO ke Asia Tengah tersebut akan jadi makin mudah jika AS sanggup memegang kendali terhadap Tibet dan Xinjiang, dimana dua daerah tersebut mengharapkan kemerdekaan dari Tiongkok. Perluasan NATO ke Asia Tengah tersebut berhubungan dengan signifikansinya kawasan Asia Tengah dimata AS. Asia Tengah ialah wilayah barat yang luasnya yakni 21% dari luas Benua Asia terdapat 5 negara yang dijuluki sebagai wilayah poros politik dunia, dimana selama 2 dekade terakhir ke 5 negara tersebut memiliki simpanan sumber daya alam yang besar,

yaitu emas, gas, minyak dan uranium. Negara-negara tersebut ialah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan (Assl, 2012).

Disamping mempunyai kepentingan untuk memonopoli kawasan yang sangat melimpah akan minyak bumi, gas alam dan sumber mineral yang lain, AS juga mempunyai kepentingan untuk memasok logistik peralatan tempur ke Afghanistan. Seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Bush, Afghanistan telah meratifikasi sebuah konstitusi baru yang demokratis dengan perlindungan yang kuat untuk hak-hak perempuan dan kebebasan sipil, telah diselenggarakan pemilihan Presiden pertama tahun 2004, diadakannya pemilu legislatif yang bebas dan adil serta Amerika Serikat telah berkomitmen lebih dari 10 miliar dollar AS di tahun 2008 dan 2009 untuk pembangunan politik dan ekonomi. Di Libya, Presiden Bush membujuk pemerintah Libya untuk menghentikan program *Weapons of Mass Destruction* (WMD) dan meninggalkan terorisme, yang mengarah ke normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Libya. Di Teheran Presiden Bush bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk mengisolasi rezim di Teheran dan memenangkan dukungan untuk tiga resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena kegagalannya untuk menghentikan pengayaan uranium dan kegiatan sensitif proliferasi lainnya. Selain itu, Amerika Serikat juga berkontribusi dalam demokratisasi Myanmar, Lebanon, Ukraina, Georgia, Venezuela, Bolivia, dan Nikaragua (Government, 2009, p. 10).

Kemudian penulis menganalisis bahwa intensitas kepentingan AS ialah *major issues* di sektor keamanan agar dapat menjamin keamanan AS melalui

penyebaran markas militer di daerah-daerah yang rentan terkena serangan dari musuhnya. Dimana dengan menggunakan dasar perluasan keanggotaan NATO di Asia Tengah, AS berupaya untuk mendekati 5 negara wilayah pusat di Asia Tengah yang kaya akan cadangan minyaknya dan kemudian menggunakan wilayah Tibet yang strategis untuk menahan pengaruh kekuasaan Tiongkok di Asia, khususnya di Asia Tengah. Dan membantu Dalai Lama 14 yang hendak melepaskan diri dan merdeka dari Tiongkok ialah salah satu opsi strategis AS demi menjaga keamanannya.

Adapun kemenangan di Afghanistan ialah rencana jangka panjang AS agar dapat menaklukkan Iran, Rusia dan berbagai negara pecahan Uni Soviet. Bagi AS pangkalan militer yang terdapat dikawasan tersebut mempunyai fungsi dan juga sangat strategis. Dimana AS dapat mengurangi pengaruh Rusia di kawasan pecahan Uni Soviet, mendesak Iran dan mendesak Tiongkok serta memonopoli kepentingan jangka panjang AS. Sehingga AS berupaya untuk menjaga wilayah yang strategis, khususnya di kawasan Asia Tengah supaya bisa menghadang kekuatan dan pengaruh Tiongkok.

3.4 Ideological Interest U.S.

Ideological interest AS berdasarkan dengan cita-cita AS untuk menyebarkan paham demokrasi di dunia, sehingga dunia dapat berhubungan secara damai dan jauh dari konflik. Di periode Obama sangat menentang terjadinya kekerasan terhadap masyarakat di suatu wilayah, di sisi lain AS memahami bahwa keberadaan HAM dapat membantu mengamankan perdamaian, menghalangi agresi, mempromosikan aturan hukum, memerangi kejahatan dan korupsi,

memperkuat demokrasi serta mencegah krisis kemanusiaan. Mempromosikan HAM (*ideological interest*) adalah *basic national interest* yang intensitasnya *major issues* untuk AS, sehingga AS berusaha untuk (1) meminta pertanggungjawaban pemerintah negara terhadap kewajiban mereka di bawah norma-norma HAM secara universal dan instrumen HAM internasional, (2) mempromosikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan perlindungan minoritas; mempromosikan supremasi hukum, mencari akuntabilitas, dan mengubah budaya impunitas, (3) membantu upaya untuk mereformasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan (4) mengkoordinasikan kegiatan hak asasi manusia dengan sekutu penting, termasuk Uni Eropa, dan organisasi regional (Human Rights and Democracy, 2015)

AS telah melaporkan isu-isu mengenai HAM lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Dalam laporan HAM di tahun 2010, Tiongkok telah melakukan berbagai pelanggaran HAM seperti kebijakan satu anak, pelarangan beragama bahkan menghilangnya warga Tiongkok tanpa diketahui. AS telah melakukan kampanye melawan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok. Kedua negara dengan *power* yang sangat besar ini memiliki pandangan tersendiri akan kedua belah pihak negara. AS mengklaim bahwa Tiongkok telah melakukan perdagangan manusia, diskriminasi terhadap perempuan, melegalkan aborsi dan menganggap Tiongkok tidak menghargai HAM. Dan pada April 2011 pasukan keamanan Tiongkok menutup biara dan pusat budaya tersebut setelah seorang biarawan

membakar dirinya sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Tibet. Dan juga polisi dilaporkan menahan 300 biksu secara paksa untuk menjalani indoktrinasi politik selama beberapa minggu dengan kedok “pendidikan hukum” (Watch, 2011).

Tiongkok memiliki ideologi sosialis-komunis yang menyebabkan Tiongkok memiliki pandangan yang berbeda mengenai HAM sesuai dengan ideologi komunis. Meskipun Tiongkok berpartisipasi dalam PBB mengenai HAM dan mendukung norma-norma HAM. Tiongkok tetap melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat Tibet dan diskriminasi di sektor agama, migrasi penduduk, pemisahan pada buruh dan pendidikan, pemusnahan lingkungan serta kebebasan dalam berpendapat.

Hal ini yang kemudian menjadi dorongan bagi AS untuk mengintervensi kasus pelanggaran HAM di Tibet, selain berdasarkan pada *national interest* untuk menahan hegemoni Tiongkok (*world order interest*), terdapat juga perbedaan ideologi antara AS dan Tiongkok, dalam hal ini penulis menganalisis bahwa intensitas *interest* AS ialah *major issues*. Dimana AS menggunakan *ideological interest* sebagai alasan untuk dapat mengintervensi pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok di Tibet, demi mencapai tujuan untuk mempertahankan hegemoninya di dunia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan pada penelitian ini telah menjelaskan terkait beberapa pelanggaran HAM di Tibet beserta kekayaan sumber daya alam dan letak wilayahnya yang strategis. Topik pembahasan di atas merupakan sebuah landasan ilmiah dalam menganalisis mengapa Presiden Obama menanggapi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok di Tibet untuk mencapai *national interest* AS.

Penulis telah menyimpulkan bahwa konsep *national interest* yang diidentifikasi melalui intensitas *vital* dan *major issues* milik Donald E. Nuechterlein merupakan landasan yang sangat relevan dalam menganalisis bagaimana *national interest* yang ingin dicapai oleh AS. *Vital issues* di sektor *world order interest*, *economic interest* dan *major issues* di sektor *defence interest* dan *ideological interest* yang digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengumpulan data sebagai referensi tulisan ini yang kemudian menyimpulkan bahwa *basic national interest* menekankan kepada kepentingan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat serta lingkungan disekitarnya. Dimana sebuah negara harus mempertahankan hal tersebut dengan cara apapun. Dalam hal ini penulis berfokus pada *world order interest*, *economic interest*, *defence interest* dan *ideological interest* AS.

World order interest AS berdasarkan pada prinsip *national security strategy* untuk membuat AS menjadi negara nomor 1 dunia, sementara itu Tiongkok mengalami perkembangan pesat dan memiliki pengaruh yang besar di Asia, dimana hal tersebut membuat AS khawatir akan hegemoninya di dunia, sehingga AS melakukan intervensi kasus pelanggaran HAM di Tibet dengan tujuan untuk menahan hegemoni Tiongkok.

Economic interest AS berdasarkan pada kebutuhan sumber bahan mineral, dimana produksi industri AS terus meningkat. Dimana kebutuhan akan bahan mineral tersebut tersedia di Tibet, seperti krom, kobalt, minyak bumi dan gas. Dan juga letak geografis Tibet yang berdekatan dengan 5 negara poros dunia di Asia Tengah, sehingga AS menanggapi catatan kasus pelanggaran HAM Tiongkok di Tibet yang bertujuan untuk menggoyahkan kekuasaan Tiongkok dalam memonopoli sumber bahan mineral di Tibet.

Defense interest AS berdasarkan pada kekhawatiran atas kemajuan sektor militer AS yang melakukan uji coba *anti satellite missile*, selain itu Tibet merupakan wilayah yang strategis bagi AS memperluas keanggotaan NATO di Asia Tengah dan juga untuk memposisikan misil di perbatasan kawasan tersebut, sehingga AS tidak perlu khawatir akan ancaman militer dari Rusia.

Ideological interest AS berdasarkan dengan cita-cita untuk menyebarkan paham demokrasi di dunia, sehingga dunia dapat berhubungan secara damai dan jauh dari konflik. Di periode Obama sangat menentang terjadinya kekerasan terhadap masyarakat di suatu wilayah, dalam penelitian ini isu pelanggaran HAM di Tibet menjadi fokus AS dalam mencapai *national interest*-nya.

Intervensi AS dalam menanggapi ketimpangan perlindungan HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap Tibet merupakan akar dari permasalahan yang dijelaskan pada penelitian ini. Penulis melihat bagaimana tidak seimbang perlakuan pemerintah Tiongkok dalam perlindungan HAM masyarakat Tibet, sehingga membuat AS menjadikannya sebagai tolak ukur untuk menahan hegemoni Tiongkok. Dalam penelitian ini pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana upaya suatu negara untuk mewujudkan *national interest*-nya dan AS merupakan negara yang memiliki kepentingan tersebut.

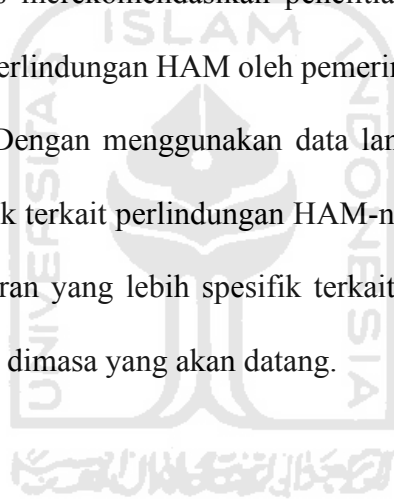
Pada akhirnya, dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Amerika Serikat Dalam Menanggapi Kasus Pelanggaran HAM Di Tibet Pada Pemerintahan Presiden Barack Obama Ditinjau Dari Perspektif *National Interest*” dapat memberikan pemahaman mendasar bahwa tentunya setiap negara memiliki *national interest*, dan setiap negara dapat menggunakan berbagai cara dalam mewujudkan hal tersebut.

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui upaya sebuah negara dalam mewujudkan *national interest*, khususnya *world order interest*, *economic interest*, *defence interest* dan *ideological interest*.

4.2 Rekomendasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas telah menyimpulkan sebagian besar upaya AS dalam mewujudkan *national* interestnya tanpa mengesampingkan kasus pelanggaran HAM di Tibet, sehingga dengan adanya intervensi yang dilakukan AS membuat Tiongkok lebih berhati-hati untuk memenuhi perlindungan HAM masyarakat Tibet.

Sebagai salah satu isu yang sensitif dalam dinamika hubungan antara AS dengan Tiongkok, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai *national interest* AS dan perlindungan HAM oleh pemerintah Tiongkok di Tibet di masa yang akan datang. Dengan menggunakan data langsung serta konkrit dari pihak pemerintah Tiongkok terkait perlindungan HAM-nya, sehingga kedepannya dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dimasa yang akan datang.



Daftar Pustaka

- Assl, N. K. (2012, March 27). *NATO's Central Asia strategy: What next?* Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/opinions/2012/3/27/natos-central-asia-strategy-what-next/>
- Cooper, H. (2010, February 10). *Obama Meets Dalai Lama, and China is Quick to Protest.* Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2010/02/19/world/asia/19prexy.html>
- David L. Cingranelli & Thomas E. Pasquarello. (1985). Human Rights Practices and the Distribution of U.S. Foreign Aid to Latin American Countries. *American Journal of Political Science*, 107-109.
- Dongfang, H. (2001, March 1). *China Ratifies ICESCR: A Change in Sight or More of the Same?* Retrieved from China Labour Bulletin: <https://clb.org.hk/content/china-ratifies-icescr-change-sight-or-more-same>
- Dumbaugh, K. (2008). *Tibet: Problems, Prospect, and U.S. Policy.* Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Dumbaugh, K. (2009). *The Tibetan Policy Act of 2002 : Background and Implementation.* Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Energy, T. i. (2013, August 26). *World petroleum use sets record high in 2012 despite declines in North America and Europe.* Retrieved from Energy Information Administration: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12691>

- Gilboa, E. (1995). The Panama Invasion Revisited : Lesson for Use of Force in the Post Cold War Era. *Political Science Quaterly*, 539.
- Goldstein. (2006). The United States, Tibet and Cold War. *Journal of Cold War Studies*, 150.
- Goldstein, M. C. (1997). *The Snow Lion and the Dragon China, Tibet, and the Dalai Lama*. Berkeley: University of California Press.
- Government, U.S. (2009). *Highlights of Accomplishment And Results : The Administration of President George W. Bush 2001 - 2009* . Washington: Morgan James Publishing.
- Government, U.S. (2010). *National Security Strategy*. Washington: The White House.
- Heil, A. L. (2003). *Voice of America: A History*. USA: Columbia University Press.
- Human Rights and Democracy*. (2015). Retrieved from U.S Department of State: <https://www.state.gov/policy-issues/human-rights-and-democracy/>
- Jacques, M. (2009). *When China Rules the World : The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World*. London : Penguin Group.
- Jerel A. Rossati & James M. Scott . (2012). *The Politics of United States Foreign Policy, Sixth Edition*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Jones, G. K. (1988). United States Dependence on Imports of Four Strategic and Critical Minerals: Implications and Policy Alternative. *Boston College Environmental Affairs Law Review*.

- Kan, S. (2007). *China's Anti-Satellite Weapon Test*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Lawrence, S. V. (2008). *The Tibetan Policy Act of 2002: Background*. Washington D.C.: Congressional Research Service .
- Lum, T. (2011). *Human Rights in China and U.S. Policy*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Lum, T. (2014). *U.S. Assistance Programs in China*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- MacAskill, J. B. (2010, March 31). *China supports Barrack Obama's call for new Iran sanctions*. Retrieved from Support The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2010/mar/31/china-supports-obama-iran-sanctions>
- Medeiros, B. G. (2000). Foreign and Domestic Influences on China's Arms Control and Nonproliferation Policies. *The China Quarterly*, 68.
- Meernik, J. (1996). United States Military Intervention and The Promotion of Democracy. *Journal of Peace research*, 402.
- Meyer, G. S. (2002). U.S.-China Aviation Relations : Flight Path toward Open Skies. *Cornell International Law Journal*, 445.
- Mineral And Mining*. (2014, June 23). Retrieved from Tibet Nature Environmental Conservation Network: <http://tibetnature.net/en/minerals-mining/>

- Montemalo, M. S. (2016). United States Asia Strategy: Policy, Power, Pivot. *The Review: A Journal of Undergraduate Student Research*, 3.
- Morrison, W. M. (2011). *China's Economic Conditions*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*,, 248.
- Ottens, N. (2015, March 15). *Four Traditions Inform American Foreign Policy*. Retrieved from ATLANTIC SENTINEL: <https://atlanticsentinel.com/2015/03/four-traditions-inform-american-foreign-policy/>
- Roberts, B. (2001). China-US Nuclear Relations : What Relationship Best Serves U.S. Interest? *INSTITUTE FOR DEFENSE ANALYSES*.
- Sautman, B. (1998). *The Tibet Question in Post-Summit Sino-American Relations*. Kowloon: Clear Water Bay.
- Sperling, E. (2004). *The Tibet-China Conflict: History and Polemics* . Washington: East-West Center.
- Thomas Lum & Hannah Fischer. (2010). *Human Rights in China: Trends and Policy Implications*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Tibet, I. C. (2013, March 21). *Tibetan History*. Retrieved from International Campaign of Tibet: <https://savetibet.org/why-tibet/history/>

Topgyal, T. (2011). *The Insecurity Dilemma and the Sino-Tibetan Conflict*. London : UK: London School of Economics and Political Science.

Wang, D. (2010). China's Trade Relations with the United States in Perspective. *Journal of Current Chinese Affairs*, 167.

Watch, H. R. (2011, October 12). *China : End Crackdown on Tibetan Monasteries*.

Retrieved from Human Rights Watch :

[https://www.hrw.org/news/2011/10/12/china-end-crackdown-tibetan-](https://www.hrw.org/news/2011/10/12/china-end-crackdown-tibetan-monasteries)

monasteries

